

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa Implementasi Program Keluarga Berencana di Kecamatan Ranah Pesisir masih belum berjalan secara optimal. Meskipun program ini memiliki standar dan tujuan yang jelas sesuai kebijakan dari pemerintah, dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai kendala. Dari segi sumber daya, keterbatasan jumlah kader dan minimnya anggaran menjadi hambatan utama. Banyak kader yang belum memiliki kapasitas memadai dan insentif yang mereka terima sangat kecil serta tidak dibayarkan secara rutin yang menyebabkan menurunnya motivasi dalam menjalankan penyuluhan. Dari aspek komunikasi dan koordinasi, pelaksana program KB masih belum mampu menjalin kerja sama yang kuat dengan seluruh masyarakat, sehingga informasi terkait manfaat dan pentingnya KB belum tersebar merata. Kondisi sosial masyarakat masih kuat memegang adat dan budaya seperti anggapan bahwa banyak anak adalah simbol kehormatan, turut menjadi faktor penghambat partisipasi dalam program KB. Secara ekonomi, masyarakat yang tergolong kurang mampu sangat bergantung pada layanan KB gratis, namun masih banyak yang ragu terhadap penggunaan alat kontrasepsi karena minimnya edukasi dan ketakutan akan efek samping. Disisi lain, kondisi politik tidak menjadi hambatan karena program KB berjalan tanpa campur tangan politik lokal. Hal ini berdampak positif dalam program KB di Kecamatan Ranah Pesisir.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian mengenai implementasi program keluarga berencana di Balai Penyuluhan Kecamatan Ranah Pesisir yang telah peneliti paparkan diatas, maka dapat diberikan saran-saran yang diharapkan mampu memperbaiki implementasi tentang program ini:

1. Meningkatkan sosialisasi dan pemertaan informasi oleh Balai Penyuluhan KB di Kecamatan Ranah Pesisir dengan menggunakan metode sosialisasi yang tidak hanya mengandalkan informasi melalui mulut ke mulut tetapi juga memanfaatkan media cetak, media sosial dan teknologi komunikasi lainnya.
2. Meningkatkan kapasitas SDM dengan menetapkan standar atau kualifikasi yang jelas untuk pelaksana program apalagi untuk kader pendamping di nagari yang menjadi implementor pertama yang berhadapan langsung dengan kelompok sasaran.
3. Meningkatkan kuantitas SDM juga penting dilakukan dengan memperhatikan kualitas dari SDM tersebut untuk tetap menjaga mutu agar tidak membebani tenaga yang sudah ada.
4. Optimalisasi anggaran dengan meninjau kembali alokasi anggaran untuk program, KB, memastikan kecukupan dana agar seluruh aspek program

termasuk sosialisasi, pembinaan dan pelaksanaan teknis di lapangan dapat berjalan optimal

5. Perubahan mindset masyarakat perlu dilakukan secara bertahap melalui edukasi yang berkelanjutan mengenai pentingnya program KB agar tidak terpengaruh oleh pikiran-pikiran menyimpang mengenai program ini
6. Memperkuat monitoring dan evaluasi kinerja untuk melakukan pengawasan secara rutin untuk mendeteksi dan menangani kendala dengan cepat

